



Penguatan Ekonomi Kerakyatan sebagai Pilar Kesejahteraan Masyarakat Menengah

Ahmad Ade Saputra^{1*} 

¹IAI Ar-Risalah INHIL Riau, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 08, 2025

Revised Agustus 11, 2025

Accepted Oktober 30, 2025

Available online Desember 20, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi

Keywords:

People's Economy, Social Welfare, Economic



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

ABSTRAK

Penguatan ekonomi kerakyatan merupakan strategi fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta sektor ekonomi berbasis komunitas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek pendapatan, kemandirian ekonomi, maupun pemerataan hasil pembangunan. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menelaah berbagai konsep, kebijakan, dan praktik ekonomi kerakyatan yang berkembang di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Namun demikian, implementasi ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Strengthening the people's economy is a fundamental strategy in achieving equitable and sustainable social welfare. The people's economy places the community as the main subject of economic development through the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), cooperatives, and community-based economic sectors. This article aims to examine the role of strengthening the people's economy as a key pillar in improving social welfare, particularly in terms of income enhancement, economic independence, and equitable distribution of development outcomes. This study employs a descriptive-analytical approach by reviewing various concepts, policies, and practices of the people's economy implemented in Indonesia. The findings indicate that the people's economy contributes significantly to strengthening the national economic structure by creating employment opportunities, increasing community purchasing power, and reducing social and economic inequality. Furthermore, strengthening the people's economy encourages active community participation in the development process and enhances local economic resilience. However, the implementation of the people's economy still faces several challenges, including limited access to capital, inadequate quality of human resources, and weak institutional support. Therefore, strong synergy among the government, the private sector, and the community is essential in formulating pro-people economic policies to ensure the realization of sustainable and inclusive social welfare.

*Corresponding author

E-mail addresses: royalsmusketeer@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat menengah yang berperan strategis sebagai penyanga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks negara berkembang, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro sering kali mengabaikan penguatan basis ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan hadir sebagai konsep yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil, koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas. Konsep ini sejalan dengan gagasan pembangunan inklusif yang menekankan pemerataan kesempatan ekonomi dan distribusi hasil pembangunan secara adil (Todaro & Smith, 2015).

Secara teoretis, ekonomi kerakyatan berpijak pada prinsip demokrasi ekonomi, di mana kegiatan produksi dan distribusi diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, keadilan sosial, serta penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi kesejahteraan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat menengah, penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dari kerentanan ekonomi akibat fluktuasi pasar dan krisis global (Mubyarto, 2004).

Masyarakat menengah memiliki posisi yang unik dalam struktur sosial ekonomi, karena berada di antara kelompok rentan dan kelompok ekonomi atas. Bank Dunia menyebutkan bahwa kelompok ini sering kali rentan mengalami penurunan kesejahteraan ketika terjadi guncangan ekonomi, seperti inflasi, krisis finansial, atau penurunan daya beli. Oleh karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi penting sebagai strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat menengah melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan usaha produktif berbasis lokal (World Bank, 2018).

Dari perspektif pembangunan ekonomi regional, penguatan ekonomi kerakyatan juga berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan antarwilayah. Teori pembangunan berbasis lokal menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal akan menciptakan efek pengganda yang lebih merata dibandingkan dengan pembangunan yang terpusat pada sektor besar dan modal intensif. Dalam hal ini, masyarakat menengah dapat berperan sebagai penggerak utama ekonomi lokal melalui kewirausahaan, inovasi, dan pengembangan jaringan usaha (Blakely & Leigh, 2010).

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan memiliki keterkaitan erat dengan konsep pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya ekonomi, mengambil keputusan, dan mengelola usaha secara mandiri. Penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah secara signifikan, terutama dalam aspek stabilitas pendapatan dan mobilitas sosial (Kuncoro, 2017).

Dalam perspektif kebijakan publik, ekonomi kerakyatan memerlukan dukungan regulasi dan kelembagaan yang konsisten. Teori ekonomi institusional menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi, termasuk kebijakan fiskal, akses pembiayaan, dan perlindungan usaha kecil. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, masyarakat menengah yang terlibat dalam ekonomi kerakyatan berpotensi menghadapi hambatan struktural yang menghambat peningkatan kesejahteraan (North, 1990).

Berbagai studi jurnal juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan mampu memperkuat kelas menengah sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kelas menengah yang kuat akan meningkatkan konsumsi domestik, memperluas basis pajak, serta memperkuat stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi pembangunan nasional secara keseluruhan (Banerjee & Duflo, 2019).

Dalam realitas sosial ekonomi saat ini, masyarakat menengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari persaingan pasar yang ketat, perubahan teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut menuntut adanya model pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada ketahanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi relevan karena mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat menengah melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan keterampilan, dan penguatan jaringan ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat menengah tidak hanya menjadi konsumen dalam sistem ekonomi, tetapi juga produsen yang berdaya saing dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat menengah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, tantangan, dan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, peran, dan dinamika penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat menengah melalui penelusuran gagasan, kebijakan, dan praktik yang berkembang, bukan untuk mengukur hubungan kausal atau menguji hipotesis secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap fenomena sosial ekonomi secara holistik dan kontekstual (Creswell, 2014).

Jenis penelitian ini merupakan kajian konseptual berbasis studi literatur dan dokumentasi, yang berfokus pada analisis teori, kebijakan publik, serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat menengah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan lokasi penelitian secara geografis tertentu, melainkan menempatkan konteks Indonesia sebagai ruang analisis umum berdasarkan dinamika ekonomi dan kebijakan nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari buku teks ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga pemerintah dan internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, UMKM, koperasi, dan kesejahteraan masyarakat menengah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dan pengkajian dokumen kebijakan. Setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi konsep utama, temuan penting, serta pola-pola penguatan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran ekonomi kerakyatan dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensintesis temuan-temuan teoritis dan empiris dari berbagai sumber untuk merumuskan pemahaman konseptual mengenai penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat menengah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dan dokumen dari beragam penulis dan lembaga untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi. Dengan langkah ini, hasil kajian diharapkan memiliki validitas konseptual yang kuat serta dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi kerakyatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan telaah terhadap berbagai penelitian, dokumen kebijakan, serta karya ilmiah terkait, penguatan ekonomi kerakyatan terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah. Ekonomi kerakyatan, yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, koperasi, dan usaha berbasis komunitas, dipandang sebagai pendekatan pembangunan yang mampu menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif berkontribusi pada peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan kemandirian ekonomi kelompok masyarakat menengah.

Dari perspektif pendapatan dan kesempatan kerja, ekonomi kerakyatan berperan sebagai penopang utama penguatan struktur ekonomi nasional. Kajian Todaro dan Smith (2015)

serta Banerjee dan Duflo (2019) menegaskan bahwa pengembangan usaha kecil dan menengah mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif stabil dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bagi masyarakat menengah, keterlibatan dalam sektor ekonomi kerakyatan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang rentan terhadap guncangan ekonomi.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat menengah. Melalui usaha produktif berbasis lokal, masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan gagasan Mubyarto (2004) tentang demokrasi ekonomi, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses produksi dan distribusi. Kemandirian ini menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Dari sisi ketahanan ekonomi, ekonomi kerakyatan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko ekonomi eksternal. Studi Bank Dunia (2018) menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan melalui usaha kecil, koperasi, dan ekonomi komunitas mampu meningkatkan resiliensi masyarakat menengah terhadap inflasi, krisis finansial, dan penurunan daya beli. Dengan memiliki lebih dari satu sumber penghidupan, masyarakat menengah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Penguatan ekonomi kerakyatan juga tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan dan kebijakan publik. Kajian ekonomi institusional menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, termasuk akses permodalan, regulasi yang berpihak, serta program pendampingan usaha (North, 1990). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menengah yang memperoleh dukungan kelembagaan cenderung lebih mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Selain faktor ekonomi dan kelembagaan, hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Jaringan sosial, kepercayaan, dan kerja sama antar pelaku usaha memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat menengah, terutama dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sumber daya formal. Putnam (2000) menegaskan bahwa modal sosial merupakan aset penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi komunitas dan memperkuat solidaritas sosial yang mendukung keberlanjutan usaha.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat menengah. Program pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan, dan literasi keuangan terbukti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan ekonomi yang lebih rasional (Kuncoro, 2017). Peningkatan kapasitas ini tidak hanya berdampak pada kinerja usaha, tetapi juga pada stabilitas ekonomi keluarga dan mobilitas sosial.

Secara makro, penguatan ekonomi kerakyatan berdampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Masyarakat menengah yang kuat secara ekonomi berperan sebagai penggerak konsumsi domestik dan investasi produktif, sehingga menciptakan efek pengganda bagi perekonomian lokal. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi kerakyatan tidak hanya relevan bagi kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan pendekatan pembangunan yang komprehensif, yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Strategi ini mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat menengah melalui peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, ketahanan terhadap risiko, serta penguatan kapasitas individu dan komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menengah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian konseptual dan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan pilar strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah secara inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada pemberdayaan UMKM, koperasi, dan usaha berbasis komunitas, mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.

Kajian ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat menengah terhadap berbagai guncangan ekonomi, seperti fluktuasi pasar, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global. Diversifikasi sumber pendapatan melalui usaha produktif berbasis lokal dan koperasi memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi eksternal serta menciptakan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga dan komunitas.

Selain aspek ekonomi, penguatan ekonomi kerakyatan juga memiliki dampak sosial yang penting, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat modal sosial. Jaringan kerja sama, kepercayaan, dan solidaritas antar pelaku usaha berperan dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat menengah, terutama dalam kondisi keterbatasan akses terhadap sumber daya formal. Modal sosial ini menjadi faktor pendukung keberlanjutan usaha dan memperkuat kohesi sosial dalam proses pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan penguatan ekonomi kerakyatan sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang konsisten dan berpihak kepada masyarakat. Akses permodalan yang inklusif, penguatan koperasi, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan literasi keuangan merupakan instrumen kebijakan yang perlu diintegrasikan secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas strategis akan memberikan dampak yang lebih merata bagi kesejahteraan masyarakat menengah dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Namun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis pada telaah literatur serta dokumen kebijakan, sehingga belum menggambarkan secara langsung dinamika empiris di tingkat lokal atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan konseptual ini dengan studi empiris, baik melalui penelitian kualitatif lapangan maupun analisis kuantitatif, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik dan tantangan penguatan ekonomi kerakyatan dalam berbagai konteks wilayah.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan pendekatan pembangunan yang relevan dan strategis dalam menghadapi tantangan ketimpangan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, ekonomi kerakyatan berpotensi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menengah yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada para responden dan informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta dukungan moral dan akademik, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Good economics for hard times*. New York: PublicAffairs.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning local economic development: Theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kuncoro, M. (2017). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (6th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi kerakyatan: Paradigma dan kebijakan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- World Bank. (2018). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. Washington, DC: World Bank.